



Perencanaan Interaktif sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengembangan Wilayah Permukiman di Kabupaten Sidoarjo

Evinda Fenny Wulandari

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45 Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: evndfny12@gmail.com

Abstract: *Population growth in Sidoarjo Regency has increased quite high every year. This then causes an increase in the need for land as residential land to meet the population's housing needs. To overcome this problem, efforts are needed from the Sidoarjo Regency Government through development planning and development of residential areas. This research discusses the application of Interactive Planning in development planning and development of residential areas in Sidoarjo Regency as well as coordination between relevant stakeholders in developing residential areas in Sidoarjo Regency. The aim of this research is to determine the application of interactive planning in development planning in Sidoarjo Regency as well as the coordination carried out between stakeholders in implementing the development of residential areas in Sidoarjo Regency. The theory used in this research is the Interactive Planning theory put forward by Ackoff Russel. The Method used is a descriptive qualitative research method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this research are that the application of interactive planning in development planning and development residential areas in Sidoarjo Regency is already underway but hasn't been implemented optimally. This is based on the success factors of interactive planning which include participative principal, continuity principal, and holistic principal which are still not optimally fulfilled. Apart from that, coordination between stakeholders in the implementation of residential area development is still not optimal.*

Keywords: *Interactive Planning, Sustainable Development, Development of Residential areas*

Abstrak: Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan sebagai lahan hunian untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal penduduk. Untuk mengatasi masalah ini sangat diperlukan upaya dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman. Penelitian ini membahas mengenai penerapan *Interactive Planning* dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo serta koordinasi yang dilakukan antar *stakeholder* terkait dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan interaktif dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo serta koordinasi yang dilakukan antara *stakeholder* dalam melaksanakan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori *Interactive Planning* yang dikemukakan oleh Ackoff Russel. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *interactive planning* dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan namun belum optimal dilaksanakan, hal tersebut didasari oleh faktor keberhasilan perencanaan interaktif yang meliputi prinsip partisipatif, prinsip berkelanjutan, dan prinsip holistik masih belum terpenuhi secara optimal. Selain itu, koordinasi antar *stakeholder* dalam pelaksanaan pengembangan wilayah permukiman masih belum maksimal dilakukan.

Kata Kunci: Perencanaan Interaktif, Pembangunan Berkelanjutan, Pengembangan Wilayah Permukiman

LATAR BELAKANG

Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di kawasan Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 714,2km persegi dimana kawasannya terbagi atas 18 Kecamatan, 31 Kelurahan/desa, dan kurang lebih sekitar 322 dusun. Sidoarjo juga merupakan salah satu Kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, dengan jumlah penduduk sebanyak 2,7 juta jiwa pada akhir tahun 2023 sesuai dengan hasil sensus data penduduk Kabupaten Sidoarjo. Persentase pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya diketahui memiliki peningkatan yang cukup signifikan, dari hasil data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya dapat mencapai angka 1,5-2,1 persen.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo 2019-2023				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Jiwa	2.266.533	2.033.764	2.238.069	2.266.533	-

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2019-2023 jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Tingginya persentase peningkatan jumlah penduduk ini kemudian menyebabkan beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, tingginya angka kriminalitas, dan terutama pada tingginya kebutuhan lahan untuk kepentingan tempat tinggal atau lahan hunian. Adanya masalah yang timbul di Kabupaten Sidoarjo terutama pada tingginya angka kebutuhan lahan untuk tempat tinggal ini kemudian mengakibatkan banyaknya terjadi kegiatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini dijelaskan dalam “Sidoarjo Dalam Angka 2022” yang merupakan suatu laporan rekapitulasi statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo yang menyebutkan bahwa, berkurangnya luasan lahan pertanian aktif di Kabupaten Sidoarjo saat ini adalah karena banyaknya kegiatan alih fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan penggunaan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan permukiman dan perumahan untuk tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Kawasan permukiman merupakan suatu bagian dari lingkungan yang berupa ruang baik dalam wilayah perkotaan atau pedesaan dengan fungsi utama sebagai lahan tempat tinggal bagi masyarakat di daerah tersebut untuk mendukung kegiatan ekonomi yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Adanya fenomena peningkatan kebutuhan lahan yang signifikan ini kemudian menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 bahwa Bupati Kabupaten Sidoarjo memiliki visi dan misi “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”, dimana maksud dari visi dan misi ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. .

Pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo dijelaskan beberapa hal terkait dengan strategi umum untuk mewujudkan visi dan misi diantaranya: 1). Penguatan Tata kelola Pemerintah dan Inovasi Pelayanan Publik, 2). Penguatan Ekonomi Sektor Strategis Simultan dengan Percepatan Ekonomi Kerakyatan, 3). Pemenuhan Infrastruktur Tata Kota Terintegritas dengan Pengembangan Wilayah dan Sistem Transportasi Terpadu, 4). Pembangunan yang Berpusat pada Manusia (*Human Centered Development*), 5). Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Spirit Pembangunan. Untuk menunjang keberhasilan dari strategi yang telah dijelaskan dalam RPJMD tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menguatkan strategi perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman melalui salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang membahas terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomer 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, menjelaskan tentang rencana tata ruang Kabupaten Sidoarjo selama 20 tahun kedepan. Dalam Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 5 bagian yang kemudian disebut dengan SSWP. Pembagian wilayah di Kabupaten Sidoarjo ini di maksudkan untuk meratakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Pembagian wilayah di Kabupaten Sidoarjo terbagi atas SSWP 1 hingga SSWP 5 dimana di dalamnya terdapat semua sektor yang diperlukan dalam pembangunan yang meliputi Industri, pertanian, konservas, pariwisata, dan permukiman rakyat. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi dasar dalam suatu penyusunan perencanaan pembangunan daerah, RPJMD merupakan salah satu bagian yang berperan penting dan berhubungan erat dengan perencanaan pembangunan nasional terutama sebagai pendukung dan penunjang koordinasi antara para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam pembangunan.

Dalam pengembangan wilayah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo, tentu nya pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan-peraturan yang telah di sepakati dibawah pengawasan instansi terkait yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang kemudian pelaksanaan perancangannya akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidoarjo yang kemudian secara detail akan ditindak lanjuti oleh Dinas

yang bersangkutan yakni Dinas Perumahan, Pemukiman, Ciptakarya, dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo melalui Rencana strategis dan juga rencana kerja tahunan, kemudian dalam pelaksanaannya akan melibatkan instansi dan juga stakeholder lainnya. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam urusan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo ini kemudian menyebabkan beberapa urgensi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo. Dalam masalah pengembangan wilayah pemukiman yang terkait dengan proses perencanaan hingga pelaksanaan, para aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan (Stakeholders) yang terlibat memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam proses perencanaan tersebut. Perencanaan pembangunan yang dirancang oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana rencana tersebut memiliki perbedaan antara satu sama lainnya dikarenakan proses penyusunan rencana strategis dilakukan secara individu oleh para pemangku kepentingan dan instansi itu sendiri, sehingga memungkinkan untuk terjadi adanya kurang koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo masih belum banyak diketahui secara umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terkait dengan penerapan perencanaan interaktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan wilayah permukiman. Adapun tahapan yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah menggunakan teori interaktif planning menurut pendapat dari Ackoff Russel dimana dalam perencanaan interaktif terdapat tiga prinsip yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: 1). Participatif Principal, 2). Continuity Principal, dan 3). Holistik Principal (Puspaningtyas, 1945). Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk dapat menganalisis koordinasi antara instansi terkait yang dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan juga Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan rencana strategis terkait dengan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo

KAJIAN TEORITIS

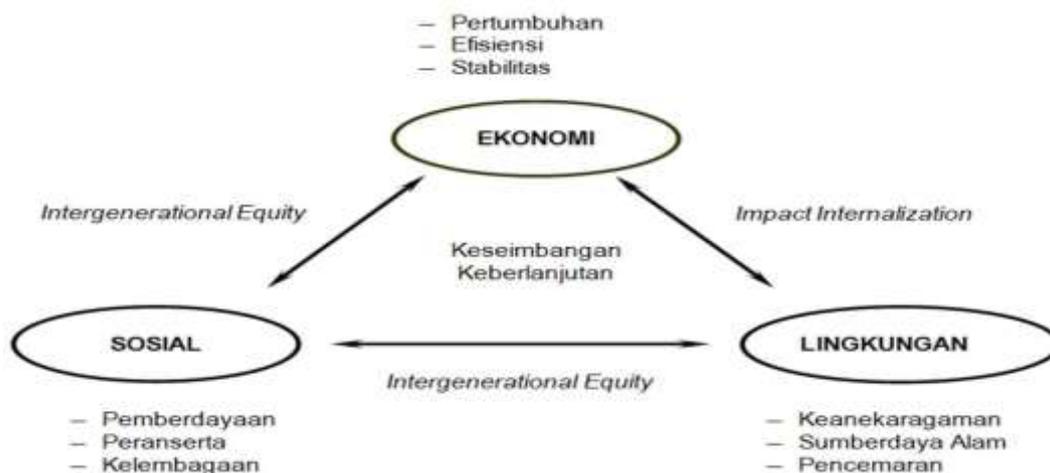
Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan secara garis besar diartikan sebagai kegiatan administrasi dalam kegiatan pembangunan suatu negara. Menurut pendapat dari Sondang P. Siagian (1983), Administrasi pembangunan merupakan seluruh usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara

dalam berbagai aspek kehidupan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan (Setiawan & Pembangunan, 2019). Administrasi pembangunan dalam pelaksanaannya memuat fungsi dan pendekatan manajemen sebagai penunjang dari rangkaian perencanaan yang telah dibuat oleh para administrator. Pendekatan manajemen (*tools of management*) dalam pelaksanaan administrasi pembangunan biasanya disebut dengan 5M yang meliputi Men (Manusia), Money (Uang), Materials (Bahan Baku), Methode (Metode/Tatacara), Machine (Mesin). Pendekatan manajemen pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut: 1). Perencanaan Pembangunan yang meliputi tujuan, sasaran, jangka waktu, isu/masalah yang sedang dihadapi, modal/sumberdaya, kebijakan pelaksanaan, manusia, organisasi/badan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, 2). Pengerahan Sumber Daya, 3). Kebijakan Pembangunan yang mendukung tujuan, 4). Manajemen Sumber Daya Manusia, 5). Kerjasama Internasional.

Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam suatu negara. Dalam pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tiga aspek pembangunan berkelanjutan yang dimaksud ialah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengembangan 3 pilar dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini memberikan pengertian bahwa pembangunan berkelanjutan harus dapat mencapai kesetaraan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan yang berkaitan antara satu sama lainnya.



Gambar 1 Tiga Pilar Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber : *retnoeka-wordpress, 2015*

Interactive Planning

Perencanaan Interaktif atau yang biasa disebut sebagai *interactive planning* merupakan suatu rangkaian proses yang digunakan untuk menentukan apa yang diinginkan dalam sebuah organisasi pada kondisi saat ini yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah kesenjangan yang sedang dihadapi dengan upaya penyelesaian yang akan dilaksanakan dimasa depan. Perencanaan interaktif dalam suatu perencanaan pembangunan memiliki tujuan untuk merumuskan rencana terkait pembangunan dalam suatu negara yang berdasarkan pada suatu sistem. Menurut pendapat dari Ackoff Russel (1981), menyebutkan bahwa “Interactive planning focuses on making the future, believing that an organization's present depends on as much on what it does now as on what it does to” (Puspaningtyas, 1945). Dalam pendapatnya, Ackoff juga menyebutkan bahwa tujuan suatu perencanaan interaktif adalah upaya efektif untuk mencapai keadaan yang diidealkan. Dalam pelaksanaannya, *interactive planning* harus memenuhi beberapa prinsip dalam prosesnya yang meliputi : partisipasi masyarakat, kesinambungan dari setiap prosesnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, holistik dalam artian menyeluruh dan utuh, memiliki sistem pembelajaran dan adaptif, serta bersifat demokratis dan terbuka (Penguatan et al., 2020). Metode perencanaan interaktif atau *interactive planning* yang dikemukakan oleh Ackoff Russel menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang mendukung suatu proses perencanaan: 1). *Participative Principle*, 2). *Continuity Principle*, 3). *Holistic Principle*. Teori Interactive Planning dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo yang berdasar pada perencanaan pembangunan dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus penelitian pada penerapan perencanaan interaktif dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori Interactive Planning menurut Ackoff Russel yang memiliki tiga prinsip yaitu prinsip partisipatif, prinsip berkelanjutan, dan prinsip holistik. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder, dimana data primer di dapatkan melalui observasi dan wawancara secara langsung pada narasumber terkait dengan perencanaan pengembangan wilayah permukiman dan data sekunder diperoleh melalui analisis dari dokumen-dokumen pendukung penelitian seperti dokumen Peraturan Daerah, buku, e-jurnal, dan yang lainnya. Teknik mengumpulkan data pada penelitian ini dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan metode analisi data spirall analisis menurut J. W. Cresswell.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

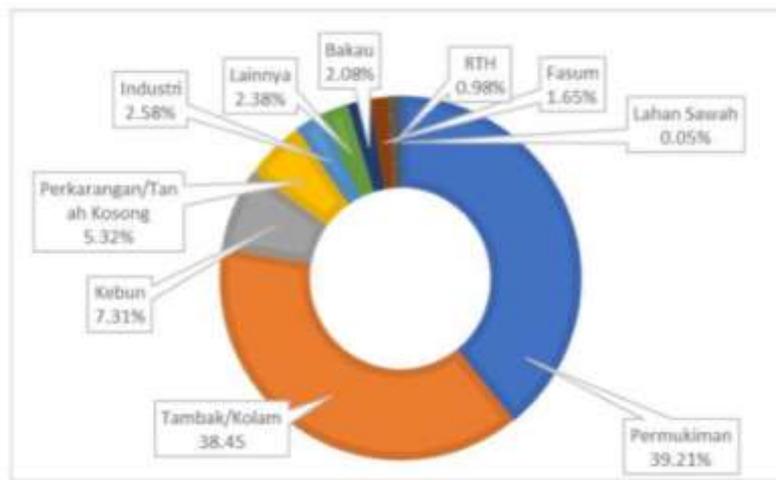
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 prinsip *interactive planning* yang digunakan untuk mengukur penerapan perencanaan interaktif dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo. Adapun ulasan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa narasumber terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :

Interactive Planning dalam Pengembangan Wilayah Pemukiman untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo

1. Participative Principal

Participative principal atau prinsip partisipatif merujuk pada bentuk partisipasi yang terjadi dalam proses penyusunan dan perencanaan pengembangan wilayah permukiman dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipatif melibatkan bentuk partisipasi antara pihak-pihak terkait dengan stakeholder lain dan juga masyarakat. Adanya keterlibatan dari pihak-pihak lain seperti para pemangku kepentingan, swasta, pihak penyelenggara, pihak penyedia, dan juga masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan bertujuan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menjelaskan terkait dengan sejauh mana perencanaan pembangunan mengenai pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan sebagai topik yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini.

Kabupaten Sidoarjo adalah satu diantara wilayah salah yang berada di Provinsi Jawa timur dengan luas wilayah sebesar 714,2km yang terbagi menjadi 18 wilayah kecamatan, 31 wilayah kelurahan, dan 322 wilayah dusun dengan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa pada tahun 2023. Persentase pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya diketahui memiliki peningkatan yang cukup signifikan, dari hasil data BPS Kabupaten Sidoarjo peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya dapat mencapai angka 1,5-2,1 persen.



Gambar 2 Persentase Luasan Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidoarjo
 Sumber : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo di tahun 2023, terdapat beberapa program yang dicanangkan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang P2CKTR. Dimana untuk mencaapai tujuan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah tersebut terdapat beberapa tindakan yang telah dijelaskan,

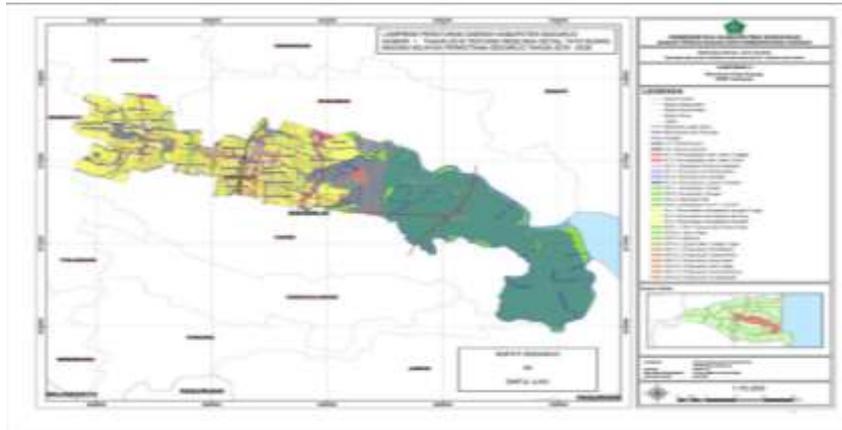
Table 2 Program Tindakan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang P2CKTR

Program Utama (Teknis)		Program Pendukung (Generik)	
No	Program	No	Program
1	Program Manajemen dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program untuk Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah		
3	Program untuk Meningkatkan Permukiman		
4	Program Pengembangan Perumahan		
5	Program Wilayah Permukiman		
6	Program Penataan Konstruksi Gedung		
7	Program Penataan Bangunan dan Pengaruhnya pada Lingkungan		
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
10	Program Ganti Kerugian dan Pemberian Tanah untuk Pembangunan		

Sumber : Renja DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo, 2023

Pada uraian tabel Rencana Kerja (Renja) diatas, pengembangan wilayah permukiman merupakan salah satu program utama yang dirancangkan oleh DP2CKTR dimana diatur melalui tiga program utama yang meliputi :

1. Program Pengembangan Permukiman
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman



Gambar 3 Peta Persebaran Wilayah Permukiman dan Perkotaan Kabupaten Sidoarjo
 Sumber : Perda No 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Program-program yang telah disebutkan dan dicanangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DP2CKTR) Kabupaten Sidoarjo ini kemudian lebih dikerucutkan lagi menjadi program yang lebih kecil untuk dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dalam proses mencapai sasaran tersebut, DP2CKTR kemudian memiliki indikator keberhasilan pada masing-masing program yang dijelaskan lebih rinci dalam dokumen Renja lengkap dengan persentase, anggaran, faktor penghambat dan kegiatan tindak lanjut yang dilakukan dalam menghadapi faktor penghambat program. Penjelasan singkat program sebagai berikut :

Table 3 Indikator Rencana Kerja (Renja) Pengembangan Permukiman pada DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program
1	Program Pengembangan Permukiman	Persentase infrastruktur kawasan permukiman yang tersedia
2	Program Pengembangan Perumahan	Rumah susun yang tersedia dan rumah korban pasca bencana
3	Program Kawasan Permukiman	Penyelesaian luasan kawasan permukiman kumuh
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Area di luar permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang dilindungi dari pertumbuhan dan perkembangan

Sumber : Renja Perubahan DP2CKTR Kabupaten Sidoarjo, 2023

Dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Bappeda dan DP2CKTR sama-sama memiliki program berkelanjutan dimana program tersebut dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah. Program-program pengembangan wilayah permukiman yang dimaksudkan adalah terkait dengan perumahan, rumah susun, permukiman dan perkampungan, dan yang lain sebagainya.

2. Continuity Principal

Continuity Prinsipal atau prinsip berkesinambungan dalam penelitian ini digunakan untuk menilai dan melihat sejauh mana perencanaan pembangunan dan pengambanan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dan juga sejauh mana konsep berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan tersebut telah dilaksanakan. Konsep

berkelanjutan yang dimaksud adalah keberlanjutan dari konsep dan rencana pembangunan dari periode sebelumnya ke tahun-tahun berikutnya memiliki kesinambungan antara satu sama lain atau tidak. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan terkait dengan program-program yang telah dicanangkan oleh Bappeda dan juga DP2CTR Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo.

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, pada perencanaan pengembangan wilayah permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk dapat mencapai tujuannya yakni Sidoarjo berkelanjutan yang berarti membangun Kabupaten Sidoarjo yang berkelanjutan, *continuity principal* atau konsep berkesinambungan merujuk pada sejauh mana Pemerintah Daerah mengadakan program berkelanjutan dalam pelaksanaan pengembangan wilayah permukiman yang sudah dirancang sesuai dengan RPJMD dan juga Rencana Tata Ruang Wilayah. Seperti tujuan awal Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dituangkan melalui visi dan misi Bupati Kabupaten Sidoarjo dalam RPJMD untuk mewujudkan Sidoarjo yang berkelanjutan adalah dengan dilakukannya program-program terkait dengan pembangunan.

Salah satunya adalah program terkait dengan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo untuk mengoptimalkan pengembangan wilayah permukiman dan perumahan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan lahan hunian dan kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Holistik Principal

Dalam suatu perencanaan interaktif atau interactive planning dalam sebuah penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah, prinsip holistik memiliki arti penilaian seberapa holistik atau menyeluruh suatu perencanaan pengembangan wilayah permukiman telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Prinsip holistik dalam penelitian ini menilai sejauh mana perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Sidoarjo telah memikirkan segala aspek pembangunan berkelanjutan yang meliputi faktor lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Prinsip holistik dalam hal ini juga menilai sejauh mana para pemangku kepentingan berkoordinasi dan berintegrasi dalam proses perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Sidoarjo.

Pembahasan

Fenomena pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan beberapa masalah yang harus diatasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu masalah yang ditimbulkan dari adanya

fenomena ini adalah meningkatnya angka kebutuhan lahan hunian. Maka dari itu, peneliti dalam hal ini menganalisis fenomena tersebut melalui penelitian dengan judul “*Interactive Planning* dalam Pengembangan Wilayah Pemukiman untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis *interactive planning* dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo dan koordinasi yang dilakukan antar OPD dalam melaksanakan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan deskripsi dan analisis data hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, DP2CKTR, DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, bahwasannya dalam perencanaan pembangunan terkait dengan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan *interactive planning* atau perencanaan Interactive. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi lapangan dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada OPD terkait.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Interactive Planning* pada perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, diperlukan adanya koordinasi yang baik antar stakeholder yang bersangkutan. Hasil yang didapatkan oleh peneliti dari observasi lapangan dan juga wawancara yang dilakukan pada tempat penelitian, koordinasi yang dilakukan antar OPD terkait dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam koordinasinya. Masalah yang dimaksud adalah masalah komunikasi yang terjadi pada salah satu OPD. .

***Interactive Planning* dalam Pengembangan Wilayah Permukiman di Kabupaten Sidoarjo untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.**

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan ulang hasil dari penelitian yang dilaksanakan berdasarkan pada data hasil pengamatan di lapangan dan wawancara yang sudah di deskripsikan diatas. Peneliti melakukan analisis perencanaan pembangunan pada pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo menggunakan *Interactive Planning* yang dalam hal ini adalah satu diantara metode pendekatan yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perencanaan pembangunan berkelanjutan pada suatu daerah. Peneliti menggunakan teori *Interactive Planning* yang dikemukakan oleh Ackoff Russel, dimana terdapat 3 konsep prinsip yang perlu diperhatikan dalam suatu perencanaan pembangunan.

1. *Participative Principal*

Participatif principal atau prinsip partisipasi merupakan suatu keterlibatan dari pihak luar dalam suatu perencanaan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam teori *interactive planning* yang di kemukakan oleh Ackoff Russel dalam artikel “In interactive planning, the professional planner’s role is not to plan for others, but to encourage and facilitate their own planning. The act of planning is what matters. It provides for the participation of persons directly affected by the plan, thus motivating them to effectively carry out the plan.”(Santoso, 2015) dimana yang dimaksud adalah dalam suatu perencanaan interaktif, pihak perencana memiliki peran untuk mendorong dan memberikan fasilitas bagi perencanaan yang dibuat sendiri bukan untuk melakukan perencanaan bagi pihak lain. Dengan kata lain, pihak perencana harus melibatkan pihak-pihak yang merasakan dampak terkait dalam suatu perencanaan yang telah dibuat agar perencanaan tersebut berjalan lebih efektif. Partisipasi sangat diperlukan dalam suatu perencanaan interaktif, hal ini di karenakan pemerintah membutuhkan banyak sekali masukan dari pihak lain dalam merencanakan suatu pembangunan jangka panjang yang dimana perencanaan tersebut akan melibatkan banyak pihak. Dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, secara umum prinsip partisipatif ini sudah terpenuhi dilihat dari aspek-aspek pada prinsip ini yang sudah dilaksanakan dalam pengembangan wilayah permukiman mulai dari 1). *Motivation*, 2). *information*, 3). *Knowledge*, 4). *Understanding*, 5). *Wisdom*, dan 6). *Effective thinking* yang dibutuhkan. hanya saja, aspek-aspek pada prinsip ini masih belum optimal dilakukan karena masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu untuk ditingkatkan seperti perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari OPD terkait dengan tupoksi masing-masing dalam pengembangan wilayah permukiman sehingga tidak terjadi saling lempar informasi.

2. *Continuity Principal*

Prinsip berkelanjutan merupakan salah satu prinsip yang harus terpenuhi dalam suatu perencanaan interaktif. Menurut pendapat Russel dalam artikel Michael L, menjelaskan bahwa “Suatu organisasi memiliki perubahan yang terus menerus terjadi seiring dengan berjalannya waktu (Santoso, 2015).

Dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak perencana secara universal memberikan kewenangan kepada OPD yang lebih berwenang dalam mengurus urusan permukiman. Program tersebut disusun sesuai dengan dokumen Peraturan Daerah terkait dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan juga Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Program yang dicanangkan merupakan program jangka menengah yang setiap tahun akan dilakukan evaluasi program berkelanjutan. *Continuity Principal* dalam perencanaan interaktif memiliki 3 aspek yang harus diperhatikan:

a. *Monitoring/Pemantauan*

Dalam suatu perencanaan pembangunan, monitoring atau pemantauan selalu dilakukan untuk memastikan apakah program, kegiatan, atau urusan yang telah direncanakan berjalan dengan baik atau sebaliknya. Dalam perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Sidoarjo melakukan monitoring secara global. Monitoring oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo belum dilaksanakan secara sub-sektor. Sedangkan, pada DP2CKTR Kegiatan pemantauan program dilakukan secara berkala setiap triwulan yang kemudian akan dipaparkan dalam laporan evaluasi.

b. *Evaluation/Evaluasi*

Evaluasi pada program yang dilaksanakan dalam pengembangan wilayah permukiman di lakukan secara berkala setiap triwulan. Persentase indikator keberhasilan program yang dirancangan dalam pengembangan wilayah permukiman apabila tidak memenuhi persentase yang ditargetkan kemudian akan di tindak lanjuti pada triwulan selanjutnya. Namun, model evaluasi program yang dimaksud tidak dijelaskan dengan rinci oleh OPD terkait. Bentuk evaluasi yang dimaksudkan dalam dokumen rencana kerja hanya dijelaskan terkait dengan pencapaian saat ini dan juga hasil yang harus dicapai di triwulan selanjutnya. Sejauh ini hasil dari evaluasi program pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo terdapat pada persiapan dokumen perencanaan.

c. *Modification/Modifikasi Pemikiran*

Modifikasi model pemikiran dalam prinsip kontinuity atau berkelanjutan sangat diperlukan karena modifikasi dapat mendorong terciptanya pemikiran baru untuk dapat mengoptimalkan rencana yang telah disusun. Dalam pengembangan wilayah permukiman, modifikasi pemikiran atau program yang telah dirancangan perlu di lakukan. Pada program yang telah dirancangan oleh DP2CKTR sebagai rencana pengembangan wilayah permukiman tidak memiliki bentuk modifikasi yang signifikan. Hasil dari evaluasi yang dilakukan cenderung hanya melanjutkan program yang blm berjalan secara maksimal pada triwulan sebelumnya. Sehingga perubahan yang dihasilkan pada program tidak terlihat secara gamblang perbedaannya antara program sebelumnya.

3. Holistic Principal

Holistic principal atau prinsip keseluruhan merupakan suatu prinsip yang harus ada dalam suatu perencanaan interaktif. Maksud dari prinsip holistik dalam perencanaan pembangunan adalah suatu perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan banyak aspek secara menyeluruh dan merata, sehingga pembangunan yang dilakukan akan menghasilkan suatu keseimbangan dan keterkaitan satu fungsi dengan yang lainnya. Dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, perencanaannya harus meliputi aspek-aspek yang lainnya seperti aspek sumber daya manusia, sosial, ekonomi, politik, lingkungan, budaya, spiritual, dan yang lainnya juga harus seimbang untuk dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan. Prinsip holistik dalam hal ini mengacu pada penilaian seberapa menyeluruh perencanaan pembangunan terutama pada pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sudah dilaksanakan.

Prinsip holistik dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup terpenuhi dengan baik, dalam pelaksanaan program-program terkait dengan pengembangan wilayah permukiman sudah dipertimbangkan aspek-aspek di sekelilingnya mulai dari manfaat, fungsi, anggaran dan juga lainnya. Dalam prinsip holistik terdapat 2 aspek yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan diantaranya,

a. Koordinasi

Pada perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, secara umum Bappeda hanya sebagai lead leader perencanaan sehingga untuk perencanaan lebih lanjut dilakukan oleh DP2CKTR sebagai dinas yang bersangkutan. Dalam hal ini selain DP2CKTR, OPD lain yang berkaitan dengan pengembangan wilayah permukiman juga harus paham dengan mekanisme perencanaan yang sesuai sehingga tidak terjadi sasaran program yang sama. Seperti koordinasi dengan Dinas Perizinan terkait dengan pengajuan perumahan baru, koordinasi dilakukan melalui online pada sistem OSS RBA kemudian diberikan kepada DP2CKTR untuk ditindaklanjuti kesesuaian dokumen dengan rencana tata ruang wilayah. Sejauh ini koordinasi dalam pengembangan wilayah permukiman sudah berjalan baik antara stakeholder, OPD, dan juga masyarakat sehingga hal ini mendorong untuk terlaksananya kegiatan dengan efisien. Namun, masih ada beberapa hal yang belum jelas koordinasinya seperti perencanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang biasanya disusun oleh pihak penyelenggara bersamaan dengan dokumen perizinan yang dilakukan.

b. Integrasi

Pada pengembangan wilayah permukiman, integrasi antara stakeholder terkait sangat diperlukan. Bappeda sebagai pengarah dan perancang utama pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini sudah dapat mengkoordinasikan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang bersama dengan OPD dan stakeholder lainnya. DP2CKTR Ruang Kabupaten Sidoarjo sejauh ini telah melaksanakan tupoksinya dengan baik dengan berjalannya program yang telah di canangkan dalam rencana kerja terkait dengan pengembangan wilayah permukiman. Perencanaan pembangunan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan juga RPJMD Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi masalah tingginya angka kepadatan penduduk dan juga tingginya angka kebutuhan lahan.

KESIMPULAN

Dalam perencanaan pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Penerapan *Interactive Planning* dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan telah diterapkan oleh para perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan perencanaan interaktif dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini sudah berjalan baik tetapi belum optimal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan tindakan yang belum dilakukan seperti masih banyaknya program perencanaan yang belum berjalan, kurangnya koordinasi antara DP2CKTR dengan OPD yang bersangkutan (Dishub, DLHK, Dinas PU, DPMPTSP, dan PDAM), adanya miskomunikasi antara bidang di DP2CKRT, masih ada program yang tumpang tindih antara OPD yang berbeda. Sehingga penerapan *Interactive Planning* masih perlu dioptimalkan lagi dalam merumuskan rencana pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam proses perencanaan pembangunan, koordinasi memiliki artian yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan program yang ada. Pada pengembangan wilayah Permukiman di Kabupaten Sidoarjo, koordinasi yang dilakukan antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait sudah berjalan dengan cukup. Koordinasi antara OPD (Dishub, DLHK, Dinas PU, DPMPTSP, dan PDAM) masih belum terjalin baik secara langsung maupun secara dokumen, masih sangat banyak miskomunikasi, sumber daya manusia yang tidak mumpuni, dan yang lainnya. Akibatnya, meskipun program pengembangan wilayah permukiman sudah dijalankan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja masih terdapat

banyak sekali evaluasi di setiap monitoring yang dilaksanakan yang kemudian berdampak pada lamanya waktu pengerjaan.

SARAN

Untuk meningkatkan penerapan Interactive Planning dalam perencanaan pengembangan permukiman di Kabupaten Sidoarjo DP2CKTR bersama dengan Dinas terkait (Dishub, DLHK, Dinas PU, DPMPTSP, dan PDAM,) dalam proses penyusunan perencanaan lebih memperhatikan aspek-aspek yang belum dibahas dalam perencanaan seperti analisis dampak lingkungan, peningkatan program, dan yang lainnya. Proses pembahasan ini bisa dilakukan melalui pengadaan pertemuan rapat triwulan atau pertemuan lain yang lebih efektif dilakukan sehingga perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih efektif dan optimal untuk mewujudkan visi misi yang ingin dicapai. Dengan banyaknya perangkat daerah dan pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo terutama pada pengembangan wilayah permukiman diharapkan Pemerintah Daerah setempat dan stakeholder terkait lebih bisa menjaga koordinasi antara pihak demi keberhasilan rencana pembangunan yang telah disusun. Sebaiknya, disediakan media untuk berkoordinasi antara dinas dan stakeholder secara online misalnya penyediaan aplikasi/website seperti OSS yang diperuntukkan bagi kepentingan koordinasi program yang dapat di akses oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti Bappeda, Dinas terkait (Dishub, DLHK, Dinas PU, dan PDAM), serta stakeholder lain untuk mengurangi adanya tumpangtindih program yang masih banyak terjadi.

DAFTAR REFERENSI

- Bappeda Sidoarjo. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Retrieved from <https://bappeda.sidoarjo.go.id>
- BPK RI. (2009). Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029.
- BPK RI. (2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Muayyadah, N. (2020). Strategi penguatan sintesa partisipasi masyarakat dan manajemen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blora. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 6(3), 100-107.
- Puspaningtyas, A. (2016). Integrasi perangkat daerah dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan*, 17-32.

Ramadani, F. E., & Harianto, S. (2020). Konflik sosial perebutan lahan perkebunan. *Journal Paradigma*, 11(1), 1–34.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/51013>

Setiawan, F. (2019). Pengaruh teori pembangunan dunia ke-3 dalam teori modernisasi terhadap administrasi pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintahan*, 8(2), 59-69.